

**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN SEKTOR PENDIDIKAN DI DESA
HATETABAKO KECAMATAN WASILE TENGAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**BRAYEN BAKULU
MASJE PANGKEY
HELLY KOLON DAM**

Abstrak

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat, agar memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia disekitar mereka.

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari : (1) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 1 Orang (2) Kepala Desa : 1 Orang (3) Keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan (PKH) : 3 orang

hasil Penelitian ini PKH Realisasinya masih belum efektif, Program Keluarga Harapan di Desa Hatetabako masih mengalami beberapa kendala, antara lain: kurangnya koordinasi secara langsung dari pihak pendamping PKH terhadap kondisi masyarakat penerima PKH, pencairan dana PKH yang tidak tepat waktu dan dalam pemanfaatan dana bantuan PKH ini oleh keluarga penerima manfaat masih kurang tepat sasaran, rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya Pendidikan.

Kesimpulan yang dapat di tarik dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan Sektor Pendidikan Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur belum sepenuhnya tercapai dilihat dari aspek tugas atau fungsi, aspek rencana atau program, aspek ketentuan dan peraturan, dan aspek tujuan atau kondisi ideal.

Kata Kunci : Efektifitas Program Keluarga Harapan Sektor Pendidikan

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah global yang di alami oleh negara-negara terbelakang dan negara-negara berkembang, termasuk di dalamnya Indonesia yang masih dalam kategori negara berkembang. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, Pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap Pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan seringkali dipahami dalam pengertian yang sangat sederhana yaitu sebagai keadaan kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup sehari-hari.

Kualitas hidup merupakan suatu konsep yang sangat luas yang dipengaruhi kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian dan hubungan individu dengan lingkungan. Saat kualitas hidup menurun maka akan terjadi ketergantungan yang disebabkan oleh kemunduran fisik, psikis, dan sosial. Mengantisipasi rendahnya kualitas hidup, Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan program bantuan tunai bersyarat atau Program Keluarga Harapan (PKH), yang diharapkan akan mampu mempertahankan taraf kesejahteraan sosial penerima manfaat sebagaimana amanat konstitusi (Ridwan et al., 2019).

Rendahnya kualitas hidup penduduk miskin berakibat pada rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan sehingga dapat mempengaruhi produktivitas. Dengan kondisi

seperti ini menyebabkan dapat meningkatkannya beban ketergantungan bagi masyarakat. Penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan mencakup mereka yang berpendapatan rendah, tidak berpendapatan tetap atau tidak berpendapatan sama sekali. Dengan demikian maka pengentasan dan penanggulangan kemiskinan yang diupayakan berbagai pihak diharapkan dapat mengangkat taraf hidup masyarakat miskin (Utomo, 2014).

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program bantuan tunai bersyarat atau disebut dengan Conditional Cash Transfers (CCT), telah dilaksanakan di beberapa negara dan cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi Negara-negara tersebut. Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga sangat miskin mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyusutan harga BBM. Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial pada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

Program Keluarga Harapan merupakan bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam kluster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan bersyarat dan disesuaikan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Kesembungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan milenium (Millennium Development Goals atau MDGs). Setidaknya ada 5 komponen tujuan MDGs yang didukung melalui PKH, yaitu

penanggulangan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pengurangan angka kematian anak, dan peningkatan kesehatan ibu.

Faktor penting penunjang berjalannya program yaitu peran dari tim pendamping PKH. Dalam pelaksanaannya setiap RTSM yang menerima dan bantuan di dampingi oleh pendamping dalam pengalokasian dana yang telah didapatkan agar tepat pada sasaran yaitu untuk pendidikan dan kesehatan. Peran pendamping PKH menjadi sangat penting karena mayoritas Penerima dana PKH merupakan RTSM yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga membutuhkan fasilitas pendampingan. Proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH merupakan agenda rutin yang harus dilakukan sebagai upaya mengarahkan RTSM agar tepat dalam penggunaan dana bantuan tersebut.

Program Keluarga Harapan (PKH) dijalankan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Salah satu tujuan akhir dari PKH adalah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah bagi anak-anak RTSM khususnya di tingkat SD, SMP, dan SMA, serta untuk mengurangi angka pekerja di bawah umur di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, PKH dalam sektor pendidikan berupaya untuk memotivasi RTSM agar segera mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah dan mendorong mereka untuk memenuhi komitmen kehadiran dalam proses belajar, minimal 85% dari hari efektif sekolah dalam satu bulan, selama tahun ajaran berlangsung (Direktorat Jaminan Sosial, 2013 : 9)

Di Desa Hatetabako sendiri, menurut data terbaru jumlah masyarakat miskin yaitu mencapai 200 KK, dan program keluarga harapan di Desa Hatetabako sudah berlangsung sejak tahun 2015 dengan jumlah penerima bantuan atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berjumlah 30 orang. Namun Realisasinya masih belum efektif, Program Keluarga Harapan di Desa Hatetabako masih mengalami beberapa kendala, antara lain: kurangnya koordinasi secara langsung dari pihak pendamping PKH terhadap kondisi masyarakat penerima PKH dan pihak sekolah, pencairan dana PKH yang tidak tepat waktu dan dalam pemanfaatan dana bantuan PKH ini oleh keluarga penerima manfaat masih kurang tepat misalnya bantuan ini masih sering juga di gunakan untuk keperluan diluar Pendidikan anak seperti membeli pakaian dan keperluan rumah tangga lainnya, serta masih adanya anak yang putus sekolah akibat dari rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya Pendidikan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) sektor Pendidikan di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur.

TINJAUN PUSTAKA

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (2008:14) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan". Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai segala kegiatannya dengan berjalan efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas. Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan (2005:109) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: "Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya". Menurut Kurniawan (2005:109), mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut; "Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi, (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya".

Konsep Program Keluarga Harapan (PKH)

Konsep kesejahteraan sosial merupakan tujuan akhir dari tercapainya Program Keluarga Harapan. Dengan dilaksanakannya Program Keluarga Harapan ini diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi, pendidikan, serta kesehatan masyarakat secara khusus di Desa Hatetabako, Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur.

Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH) Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak

untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia disekitar mereka. Manfaat PKH saat ini juga sudah mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

KPM (Keluarga Penerima Manfaat) didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Harus dipastikan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH mendapatkan subsidi BPNT, jaminan sosial KIS, KIP, bantuan Rutilahu pemberdayaan melalui KUBE termasuk berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial lainnya, agar keluarga miskin segera keluar dari kungkungan kemiskinan dan lebih sejahtera. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Konsep Pendidikan

Menurut H. Horne, pendidikan adalah proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia.

Menurut Edgar Dalle bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang berlangsung di sekolah dan diluar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mempermainkan peranan dalam

berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang.

Jadi pendidikan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan, bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berkaitan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti yang semuanya tidak dapat diukur dengan angka. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat penelitian yang utama. Selanjutnya digunakan Teknik deskriptif untuk mengetahui dan menggambarkan tentang bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang Pendidikan di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur.

Sumber Data

Semua data yang diperoleh melalui sumber dokumentasi merupakan informasi yang dapat dijadikan narasumber data, karena dianggap menguasai bidang permasalahan dan berhubungan erat dengan pelaksanaan seluruh kegiatan untuk mempermudah penyelesaian masalah dalam penelitian. Jenis sumber data yang digunakan menjadi dua bagian yaitu:

Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung pada saat kita melakukan penelitian, sumber data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang atau informan yang secara sengaja dipilih untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada referensinya dengan permasalahan penelitian. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah Penelitian sendiri, yaitu peneliti sebagai instrumen mengamati serta mencatat fenomena objek yang terjadi

untuk diteliti dan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pedoman wawancara yaitu sebagai pedoman untuk melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Catatan lapangan yang berupa catatan-catatan yang dipergunakan untuk mencatat informasi terutama selama penelitian.

Data Sekunder

Yaitu data yang dikutip dari sumber-sumber tertentu yang digunakan sebagai pendukung data primer, dan sumber data ini merupakan sumber data yang dilengkapi serta memperkaya sumber primer atau sumber data sekunder ini diperoleh dari data pendukung. Data sekunder yang merupakan sumber data yang melengkapi sumber data primer yaitu dokumen-dokumen yang membantu dalam penelitian.

Fokus Penelitian

Focus penelitian merupakan suatu penentuan sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut mendapat hasil yang diinginkan.

Sesuai dengan rumusan masalah, maka fokus penelitian ini adalah efektivitas program keluarga harapan di desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah.

Menurut Muasaroh (2013: 13), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

1. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik;
2. Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat

dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif;

3. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif; dan
4. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai.

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Menurut Sugiyono (2014:221), penentuan informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Informan dalam penelitian dipilih secara purposive sampling, yaitu merupakan metode penetapan informan yang dibutuhkan atau dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui tentang permasalahan yang mau diteliti, sehingga mereka akan memberikan informasi secara tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti.

Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari :

1. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 1 Orang
2. Kepala Desa : 1 Orang
3. Keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan (PKH) : 3 orang

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian karena bertujuan untuk memperoleh data agar dapat

dianalisis. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- a) Observasi
- b) Wawancara
- c) Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data diperoleh sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Namun faktanya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data. Data terkumpul harus diolah sedemikian rupa sehingga menjadi informasi yang dapat digunakan dalam menjawab perumusan masalah yang diteliti. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009) mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif yaitu meliputi:

(a) Data Display (Model Data)

Langkah utama yang kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. Model didefinisikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun untuk mendeskripsikan kesimpulan dan pengambilan tindakan

(b) Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Sebagaimana kita ketahui reduksi data terjadi secara kontinyu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Reduksi dataantisipasi terjadi sebagaimana diputuskan oleh peneliti yang mana kerangka konseptual, pertanyaan penelitian, pendekatan pengumpulan data untuk dipilih.

(c) Conclusion Drawing (Verifikasi)

Langkah ketiga dari analisis adalah penarikan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan tetapi kesimpulan masih jauh, baru mulai dan pertama masih sama kemudian meningkat menjadi eksplisit dan mendasar. tetapi kesimpulan masih jauh, baru mulai dan pertama masih sama kemudian meningkat menjadi eksplisit dan mendasar.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Kebenaran atau validitas harus dirasakan merupakan tuntutan yang terdiri dari tiga hal menurut Alwasilah (dalam Bachri, 2010:54) “yakni: 1) deskriptif, 2) interpretasi, dan 3) teori dalam penelitian kualitatif”. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Bachri (2010:55) ada 4 (empat), yaitu:

1. Derajat kepercayaan (credibility)
2. Keteralihan (transferability)
3. Kebergantungan (dependability)
4. Kepastian (confirmability)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan merupakan program dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial. Program ini dalam wujudnya adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya.

Berkaitan dengan masalah yang dikemukakan dalam efektivitas program keluarga harapan sektor Pendidikan di Desa

Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur maka penelitian ini menjadikan konsep yang dikemukakan oleh Muasaroh (2013: 13) sebagai fokus bahasan dapat dilihat dari aspek tugas atau fungsi, aspek rencana atau program, aspek ketentuan dan peraturan, dan aspek tujuan atau kondisi ideal.

1. Aspek Tugas atau Fungsi

Pelaksanaan program keluarga harapan sektor pendidikan di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam penerimaan bantuan penyalurannya melalui Bank Rakyat Indonesia serta didampingi oleh Pendamping Sosial PKH.

Untuk Kecamatan Wasile Tengah terdapat 6 orang pendamping PKH dengan tingkat pendidikan Sarjana. Dalam pelaksanaan tugas terlihat bahwa pendamping PKH sangat memahami tugas dan tanggungjawabnya sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan tugas, pendamping PKH memiliki tugas antara lain :

- a. Bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa/nama lain;
- b. Melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain;
- c. Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
- d. Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
- e. Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah kabupaten/kota

Pada pelaksanaannya juga ditemukan bahwa pendamping PKH bertanggungjawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kecamatan, melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap

pelaksana PKH di kecamatan, memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana, menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH, membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH dan, melaporkan pelaksanaan PKH kabupaten/kota kepada pelaksana PKH pelaksana pusat dengan tembusan kepada pelaksana PKH provinsi. Kesemua hal tersebut diatas telah dilaksanakan oleh pendamping PKH dalam upaya pelaksanaan tugas.

Guna dapat terlaksananya program secara efektif maka diperlukannya inovasi kerja dari pendamping dalam memberikan materi dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sehingga KPM akan lebih menarik untuk mendengarkan materi yang disampaikan. Serta memberikan edukasi kepada KPM agar tidak bergantung kepada bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Dan bagi keluarga penerima PKH hendaknya lebih cerdas lagi dalam mengelola keuangan PKH agar tepat pada sarannya.

2. Aspek Rencana Atau Program

Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan oleh pemerintah berbentuk prorman bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin sehingga mereka akan terbantu dan memenuhi kebutuhan hidup termasuk dalam hal pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Sebab dengan terpenuhinya kebutuhan pendidikan baik akses, fasilitas maupun biaya diharapkan masyarakat atau penduduk usia sekolah dapat bersekolah tanpa harus diperhadapkan dengan permasalahan biaya studi.

Rencana dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan Sektor Pendidikan Di Desa Hatetabako ditemukan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan akses bagian anak usia 6 - 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan

pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 tahun.

- b. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
- c. Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Sementara itu sebagaimana ketentuan yang ada diketahui bahwa tahapan kegiatan yang direncanakan dan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Masukan merupakan langkah awal kesiapan pemerintah dalam melaksanakan program yang mencakup tersedianya dana, tersedianya pedoman dan persiapan sosialisasi.
- b. Proses merupakan tindak lanjut dari langkah pertama yaitu dilakukannya verifikasi data RTM penerima bantuan dan pelaksanaan sosialisasi.
- c. Keluaran setelah dilakukan sosialisasi RTM mengerti akan tujuan PKH, hak dan kewajiban RTM ,serta dilakukannya penyaluran dana PKH kepada RTM penerima bantuan.
- d. Manfaat dana yang diterima oleh RTM merupakan dana yang diperuntukan untuk penentuan kebutuhan pendidikan
- e. Dampak merupakan hasil dari program. Jika tidak ada penyalahgunaan baik dari petugas dan penerima maka tujuan dari PKH yakni meningkatkan kualitas pendidikan akan tercapai dengan baik

Pada pelaksanaan program di Desa Hatetabako terdapat 15 orang siswa yang menerima bantuan PKH sektor pendidikan. Dimana 2 orang siswa Sekolah Dasar, 5 orang siswa Sekolah Menengah Pertama dan 8

orang siswa Sekolah Lanjutan Atas. Ke 15 orang siswa ini berasal dari keluarga miskin sebagaimana data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Akan tetapi memperhatikan fakta lapangan yang ada di Desa Hatetabako dimana masih juga ada siswa yang berasal dari penduduk desa yang seharusnya mendapatkan bantuan melalui program keluarga harapan sektor pendidikan.

3. Aspek Ketentuan dan Peraturan

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa Program Keluarga Harapan atau yang disingkat PKH merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Dan dalam pelaksanaan pada sektor pendidikan terdapat beberapa ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaannya antara lain Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 3, 4, dan 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Dalam kebijakan diatas setidaknya ditetapkan bahwa sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Ketentuan ini yang menjadi pijakan awal untuk menilai efektifnya suatu program dilihat dari kebijakan yang ditetapkan dan kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Kenyataan menunjukkan dengan masih adanya keluarga miskin yang tidak termasuk dalam kegiatan ini maka dapat dikemukakan bahwa kesesuaian antara isi kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan masih belum sesuai atau belum efektif. Sekalipun peraturan yang ada telah dianggap tepat untuk mengayomi pelaksanaan kegiatan.

Hal penting yang harus diketahui dan perlu untuk dipahami bersama bahwa dalam Program Keluarga Harapan sektor pendidikan ini juga terdapat persyaratan yang

harus dituju. Sasaran dari Program Keluarga Harapan adalah Keluarga Sangat Miskin yang mempunyai anggota keluarga yang terdiri dari Usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD, SMP, SMA) dengan catatan bahwa anak tersebut terdaftar di sekolah/ pendidikan kesetaraan serta memiliki tingkat kehadiran minimal 85 % kehadiran di kelas. Kondisi ini yang terkadang sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat. Terkadang oleh karena permasalahan biaya sekolah atau sarana keperluan seperti buku, seragam, alat tulis atau lainnya anak menjadi tidak aktif lagi di sekolah (tidak masuk sekolah).

Sementara itu dalam tataran pelaksanaan ditemukan bahwa terdapat keluarga penerima manfaat menyalagunakan bantuan PKH yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pendidikan namun ternyata digunakan untuk keinginan lain seperti pakaian dan perabot rumah tangga lainnya. Hal ini secara tidak langsung sulit di kontrol atau diawasi oleh pendamping lokal pelaksana program. Hal ini juga sebagai akibat dari lemahnya fungsi pengawasan dalam pelaksanaan program keluarga harapan. Dalam penetapan penerima bantuan PKH diharapkan kepada petugas agar lebih jeli dalam memilih keluarga penerima PKH, dikarenakan ada keluarga yang seharusnya tidak perlu menerima PKH namun menerimanya (keluarga mampu) sedangkan keluarga yang tergolong miskin (keluarga tidak mampu) tidak menerima bantuan PKH tersebut.

4. Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal

Program Keluarga Harapan dianggap sebagai program yang baik dan sangat membantu masyarakat miskin. Kenyataan ini sejalan dengan temuan dari Londah, dkk (2018) dan Manogko (2014). Keberadaan Program Keluarga Harapan secara umum dan pada sektor pendidikan telah sangat membantu keluarga miskin, karena dengan adanya bantuan PKH ini keluarga tidak sibuk lagi mencari uang untuk

membayar biaya pendidikan dan perlengkapan sekolah anak-anak.

Terdapat dua hal penting dari Program keluarga harapan dimana untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; serta mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Adanya bantuan dari pemerintah untuk dana bagi komponen pendidikan diperuntukkan bagi murid SD sebesar Rp 450 ribu, pelajar SMP Rp 750 ribu, dan SMA sebesar Rp 1 juta per tahun dibagi ke dalam empat pencairan dalam setahun.

Perubahan yang paling banyak dirasakan adalah dari segi biaya pendidikan. Yakni dengan adanya bantuan sosial PKH, KPM merasa sangat terbantu dalam membayar biaya pendidikan anak-anak mereka. Ditemuka bahwa bantuan ini sangat meringankan Biaya Pendidikan Salah satu tujuan dari program keluarga harapan untuk peningkat antara hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan biaya yang cukup banyak terutama untuk kebutuhan sehari-hari. yang jelas engga kuat untuk biaya hariannya. Dengan adanya bantuan sosial PKH ini keluarga merasa diringankan dalam biaya pendidikan sekolah. Dimana jika biasanya mereka harus membagi penghasilan yang dimiliki untuk kebutuhan makan sehari-hari dan biaya sekolah anak, kini merasa lebih ringan karena dengan bantuan PKH dapat membantu membayar tagihan tagihan dari sekolah, serta membeli peralatan yang diperukanan pada proses belajar di sekolah.

Akan tetapi dalam situasi yang dihadapi saat ini dimana proses belajar harus dilajukan dari rumah, dilakukan secara online, membutuhkan buku pelajaran, membutuhkan internet, hp android, komputer ataupun laptop untuk belajar secara online menjadikan semakin meningkatnya kebutuhan biaya studi anak. Dengan

memperhatikan adanya besaran bantuan yang diterima serta biaya yang dibutuhkan menjadi kurang efektif dan ideal dalam situasi pandemik Covid 19.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, ditemukan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan Sektor Pendidikan Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur belum sepenuhnya tercapai dilihat dari aspek tugas atau fungsi, aspek rencana atau program, aspek ketentuan dan peraturan, dan aspek tujuan atau kondisi ideal.

1. Aspek Tugas atau Fungsi

Pelaksanaan program keluarga harapan sektor pendidikan melalui pelaksana program yang terdiri dari 6 orang pendamping . dalam pelaksanaan tugas telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat dan atau tokoh serta dengan tim penggerak PKK dan atau LK3. Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas pelaksana belum mampu menjalankan tugas dengan baik dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi melalui penggunaan waktu, bahasa dan media kegiatan. Serta dalam pendampingan, pendataan maupun proses administrasi peserta program keluarga harapan

2. Aspek Rencana Atau Program

Program Keluargan Harapan yang dilaksanakan oleh pemerintah berbentuk prorman bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin sehingga akan terbantu dan memenuhi kebutuhan hidup termasuk dalam hal pendidikan. Akan tetapi dalam pelaksanaan program ini belum terlalu efektif karena belum tepat sasaran. Hal ini karena data penduduk miskin sebagaimana data terpadu program penanganan fakir miskin belum sesuai dengan kenyataan di desa.

3. Aspek Ketentuan dan Peraturan

Program Keluarga Harapan pada sektor pendidikan telah sesuai dengan

peraturan yang ada sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 dalam hal penyediaan sumber anggaran, Akan tetapi belum berjalan dengan baik pada verifikasi rumah tangga miskin, masih ditemukannya masyarakat yang belum memahami dengan benar isi aturan program keluarga harapan, adanya masyarakat yang tidak memanfaatkan secara penuh bantuan untuk biaya pendidikan.

4. Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal

Program Keluarga Harapan dianggap sebagai program yang baik dan sangat membantu masyarakat miskin karena sangat membantu keluarga miskin dalam memenuhi biaya studi anak. Akan tetapi menjadi sangat terganggu pada situasi saat ini di masa pandemic Covid 19 dimana kebutuhan perlengkapan studi anak menjadi meningkat seperti biaya pulsa untuk belajar online maupun pemenuhan kebutuhan komputer ataupun laptop dalam menunjang kegiatan belajar.

Saran

Guna perbaikan masalah dan dalam upaya mencapai efektivitas Program Keluarga Harapan Sektor Pendidikan Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur maka disarankan :

1. Perlunya peningkatan kemampuan berkomunikasi bagi pelaksana program keluarga harapan dengan melakukan penyesuaian pada kondisi sosial masyarakat desa
2. Perlunya verifikasi faktual penduduk miskin guna update data terpadu program penanganan fakir miskin sesuai dengan kenyataan di desa.
3. Pendamping program harus secara terus menerus melakukan pendampingan, sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat peserta program.
4. Bentuk bantuan Program Keluarga Harapan sektor pendidikan perlu

menyesuaikan dengan kondisi saat ini dalam proses pembelajaran secara online guna memenuhi kebutuhan menunjang kegiatan belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. Pedoman Umum Program Keluarga Harapan.Ed. Revisi, 2013.
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. Buku Kerja Pendamping Program Keluarga Harapan.Ed. Revisi, 2012.
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan, 2013.
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan, 2013.
- Pidakarta, Made, 2007.Landasan kependidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Kementerian Sosial RI, 2007. Pedoman Umum PKH. Jakarta: UPPKH Pusat.
- Kementerian Sosial RI, 2007. Modul Diklat TOT PKH. Jakarta: Pusdiklat Kesos.
- Kementerian Sosial RI.2011. Pedoman Operasional Sistem Informasi Manajemen (SIM PKH) Kabupaten/Kota.
- Pasolong, Harbani. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Muasaroh. 2010 Aspek-aspek efektifitas study tentang efektifitas pelaksanaan program
- Gibson, Donelly, Jr, dkk. 1987. Organisasi dan Manajemen, Jakarta: Erlangga.
- Gibson, James L. 1990. Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses (Jilid II). Jakarta: Erlangga.
- Keban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta: Gava Media.
- Kementerian Sosial RI, 2007. Pedoman Umum PKH. Jakarta: UPPKH Pusat.
- Kementerian Sosial RI.2011. Pedoman Operasional Sistem Informasi Manajemen (SIM PKH) Kabupaten/Kota.
- Lestari, Sri Rahayu. 2012. Bantuan Sosial di Indonesia (Sekarang dan ke Depan).Bandung: Fokusmedia.
- Mubyarto. 2010. Membangun Sistem Ekonomi. Yogyakarta: BPPE.
- Nawawi, H. 1994. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pasolong, Harbani. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, S. P. 1986. Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2011. Membangun Perekonomian Rakyat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Bandung : CV Pustaka Setia
- Sumber lain-lain :
- Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial